

POTENSI KORUPSI DANA BANSOS DI MASA PANDEMI COVID-19

POTENTIAL FOR CORRUPTION IN SOCIAL ASSISTANCE FUNDS DURING THE COVID-19 PANDEMIC

Launa¹⁾, Hayu Lusianawati²⁾

^{1,2}Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Sahid

Jl. Prof. Dr. Soepomo No.84, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan 12870, Telp (021) 8312813
launa@usahid.ac.id¹⁾; hayu_lusianawati@usahid.ac.id²⁾

ABSTRAK

Isu potensi korupsi dana bantuan sosial (bansos) di masa pandemi Covid-19 yang diberitakan media online menunjukkan ada ketidakpercayaan pemerintah pada para pihak terkait efektivitas penyaluran dan penggunaan dana bansos bagi warga terdampak. Kajian ini mencoba menganalisis bagaimana teks berita mengonstruksi isu potensi korupsi dana bansos yang diwacanakan pemerintah melalui analisis framing berita dari empat portal berita (*vivanews.com*, *okezone.com*, *detik.com*, dan *tempo.co*) sebagai objek kajian. Kajian ini menggunakan paradigma konstruksi sosial berbasis teori *framing* Murray Edelman dengan jenis penelitian kualitatif serta metode analisis deskriptif-interpretif. Hasil kajian menunjukkan : *framing* berita *vivanews.com* cenderung kritis-oposisional, *okezone.com* cenderung netral-positif, *detik.com* cenderung kritis-responsif, dan *tempo.co* cenderung kritis-advokatif.

Kata Kunci: Analisis *Framing*, Media Online, Potensi Korupsi, Dana Bansos.

ABSTRACT

Media online reports issue the potential for corruption in social assistance funds during the Covid-19 pandemic. This report shows government distrust regarding the effectiveness of distribution in social assistance funds for affected residents. This study analyzes how the news text constructs potential corruption in social assistance funds. This study tries to analyze how the news text makes corruption in social assistance funds. Framing analysis is used to analyze news portals (vivanews.com, okezone.com, detik.com, and tempo.co). This study uses a social construction paradigm based on Murray Edelman's framing theory with qualitative research types and descriptive-interpretive analysis methods. The results of the study show: vivanews.com news framing tends to be critical-oppositional, okezone.com tends to be neutral-positive, detik.com tends to be critical-responsive, and tempo.co tends to be critical-advocacy.

Keywords: Framing Analysis, Online Media, Potential Corruption, Social Assistance Fund.

PENDAHULUAN

Pasca penangkapan Menteri Sosial, Juliari Batubara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi dana bansos untuk warga terdampak Covid-19 telah mendelegitimasi himbuan Presiden Joko Widodo yang jauh sebelumnya telah mengingatkan kabinetnya untuk tidak main-main dalam penggunaan anggaran bencana, terutama dana pandemi Covid-19 (bbc.com, 2020).

Faktual, korupsi dana bansos bagi warga terdampak Covid-19 telah menyentak kesadaran publik pasca *Majalah Tempo* menginvestigasi kasus rasuah yang bernilai fantastis ini. Pasalnya, pemerintah mengalokasikan anggaran (khusus) cukup besar untuk mencegah dan menangani

pandemi Covid-19 bagi warga terdampak. Dana tersebut berasal dari relokasi anggaran kementerian dan lembaga (K/L) yang prioritas penggunaannya masih bisa ditangguhkan. Kucuran dana bansos sebesar Rp 62 triliun menunjukkan keseriusan pemerintah dalam upaya pencegahan dan penanganan wabah Covid-19.

Kekhawatiran banyak pihak terkait potensi korupsi dana bansos bukan tanpa alasan. KPK misalnya, telah menerima 118 keluhan masyarakat terkait penyaluran dana bansos melalui aplikasi JAGA sejak diluncurkan pertama kali oleh KPK pada 5 Juni 2020. Laporan masyarakat yang diterima KPK berasal dari 78 pemerintah daerah, terdiri dari 7 provinsi dan 71 kabupaten/kota (Sari, 2020).

Tak hanya KPK, Ombudsman RI juga menerima ratusan laporan dari beragam unsur masyarakat terkait penyalahgunaan dana bansos, yang dapat diklasifikasi dalam lima titik persoalan: (1) penyaluran bantuan yang tidak merata dalam hal waktu dan masyarakat di wilayah sasaran; (2) masyarakat yang lebih darurat lapar namun tidak terdaftar, atau sebaliknya; (3) masyarakat yang terdaftar tetapi tidak menerima bantuan; (4) tidak dapat menerima bantuan, karena ber-KTP pendatang; dan (5) minimnya sosialisasi sarana pengaduan kepada penerima bantuan (Harahap, 2020).

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) juga mengidentifikasi problem potensi penyalahgunaan dana bansos pada lima titik rawan: (1) pendataan yang dilakukan pertugas secara serampangan; (2) penerima bantuan salah sasaran; (3) penggelapan dana bantuan; (4) jumlah bantuan tidak sesuai yang diterima; (5) pungutan liar yang dilakukan oleh oknum pembagi bantuan; (6) *double* pembiayaan anggaran bantuan (APBN/APBD/APBDesa) (Hasan, 2020).

Sebelumnya, jumlah kasus korupsi dana bencana juga pernah mengemuka di beberapa daerah yang mengalami bencana alam, seperti masyarakat Aceh korban tsunami di Pulau Nias, Donggala, dan Sukabumi; juga korban gempa bumi di Lombok. Menurut catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), dalam sepuluh tahun terakhir sedikitnya terdapat 87 kasus korupsi dana bencana yang telah ditangani oleh kepolisian, kejaksaan, atau KPK. Titik rawan korupsi dana bencana mulai dari tahap tanggap darurat, rehabilitasi, dan pemulihan/rekonstruksi lokasi bencana. Nilai kerugian negara akibat korupsi dana bencana ini juga cukup besar, mencapai angka ratusan miliar rupiah (Yuntho, 2020).

Tahun 2005, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga menemukan indikasi korupsi dana bencana tsunami di Aceh dan Nias mencapai angka Rp 150 miliar. Para pelaku terdiri dari kepala daerah, pegawai dinas atau kementerian, pejabat pemerintah di badan penanggulangan bencana daerah, serta pihak swasta. Sementara menurut catatan FITRA, ada indikasi penyelewengan dana hibah di Provinsi Banten tahun anggaran 2014-2015 sebesar 114,76 milyar (FITRA, 2016). Padahal ancaman hukuman bagi koruptor dana bansos, dana hibah atau dana bencana sangat berat. Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberi ancaman hukuman mati bagi pelaku korupsi dana bencana.

Terkait potensi korupsi dana bansos, studi Riawati (2015) tentang Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) di Jawa Timur menunjukkan, bahwa program P2SEM sebagai bentuk intervensi kebijakan pemerintah untuk menghindari adanya kontraksi sosial pasca kenaikan harga BBM tidak berjalan efektif. Dalam implementasinya, kebijakan P2SEM ini disinyalir menjadi bagian dari kebijakan koruptif yang melibatkan oknum pejabat di pemerintah provinsi dan DPRD Jawa Timur. Penelitian dengan metode studi kasus ini menyimpulkan: desain korupsi dalam program P2SEM bersifat sistemik; telah diinisiasi sejak awal program hingga tahap teknis penyaluran dana.

Studi Dharmakarja (2017) juga memperlihatkan lemahnya definisi, pemetaan, dan metodologi dalam menentukan kelompok miskin/rentan penerima program bansos. Dalam banyak kasus, program penyaluran bansos lebih berorientasi pada pencapaian *output* dan *outcome* ketimbang manfaat nyata (*beneficiary*) bagi kelompok sasaran. Dari sisi implementasi, manajemen penyaluran dana bansos kerap diserahkan kepada pemerintah (daerah) maupun organisasi non pemerintah (lokal) yang tidak memenuhi kriteria keahlian sosial atau tidak memiliki kompetensi dalam hal manajemen kedaruratan sosial, sehingga indikator kinerjanya hanya bertumpu pada aspek teknis penyerapan anggaran yang kerap berujung tidak tepat sasaran, dan laporannya seringkali menjadi temuan aparat pemeriksa.

Studi Haliim dan Dwiranda (2020) juga menyibak kebijakan dana hibah atau bantuan sosial yang bersumber dari APBD, yang dalam praktiknya kerap memiliki celah untuk disalahgunakan para birokrat dan para elite politik dalam skema korupsi politik yang beroperasi secara sistemik, solid, dan sinergis; baik untuk tujuan akumulasi kapital maupun untuk peningkatan popularitas/elektabilitas politik para pelaku. Pengelolaan dana hibah/bansos yang kurang efektif tak hanya diakibatkan oleh tata kelola penyaluran yang buruk (*bad governance*), namun juga oleh faktor banalitas kekuasaan, moral kepemimpinan dan budaya, serta perilaku elite dan birokrat lokal yang berwatak koruptif.

Berbekal konsep korupsi dan korupsi politik serta temuan fenomena korupsi dana bansos/hibah dari ketiga studi di atas, kajian ini berupaya menganalisis bagaimana media online mem-*framing* isu potensi korupsi dana bansos di masa pandemi Covid-19. Wacana potensi korupsi dana bansos—dan skema korupsi politik yang menyertainya—penting untuk diteliti, mengingat alasan yang melatari atensi dan intensi media massa dalam mengonstruksi isu ini, seperti: (1) besarnya perhatian pemerintah dan masyarakat atas isu ini; (2) aktualitas wacana korupsi sebagai produk relasi politik kebijakan negara; (3) momentum pewacanaan isu di masa pandemi; (4) kedekatan/jarak isu dengan suasana psikis publik yang terdampak pandemi; (5) besarnya dampak isu yang berpotensi menggeser kepercayaan publik atas kesungguhan (komitmen) pemerintah dalam melindungi hak-hak warga negara terkait bencana; dan (6) latar kepentingan politik, sosial, dan ekonomi yang menyertai isu ini.

Teori dan Konsep

Paradigma membantu merumuskan apa yang harus dipelajari; kesatuan konsensus terluas dalam suatu bidang ilmu pengetahuan, meliputi aspek ontologi, epistemologi, metodologi, aksiologi, nilai, etika, tujuan penyelidikan, sifat pengetahuan, dan kualitas kriteria (Hidayat, 2002). Paradigma mendefinisikan, mengklasifikasi serta menghubungkan antara teori, metode dan instrumen dalam satu kesatuan metodologis yang utuh (Ikbar, 2012). Paradigma yang digunakan dalam kajian ini adalah paradigma konstruksi sosial yang bangunan teoritisnya dikembangkan Berger dan Luckmann (1990).

Konstruksi sosial adalah suatu konsensus ilmiah yang memahami fenomena sosial sebagai proses yang bersifat dinamis, transaksional, dan subjektif. Fenomena sosial dipahami sebagai hasil tindakan dan interaksi individu; suatu realitas yang dialami dan dimiliki bersama secara subjektif; suatu proses pembentukan pengetahuan (kesadaran) yang berlangsung secara dialektis melalui tahap eksternalisasi, objektifikasi, dan internalisasi. Realitas sosial adalah hasil konstruksi sosial (*social construction*)—yang diciptakan (*constructed reality*) dan ditafsirkan (*interpreted reality*) melalui bahasa dan simbol-simbol tertentu—oleh kelompok komunikasi atau komunitas budaya tertentu. Bahasa tidak hanya mampu mengonstruksi citra dan simbol sebagai hasil refleksi/abstraksi dari pengalaman hidup manusia sehari-hari, melainkan bahasa juga mampu ‘mengembalikan’ citra

dan simbol itu dan menghadirkannya sebagai unsur yang objektif dalam kehidupan sehari-hari (Eriyanto, 2011).

Menurut Hamad (2004), elemen utama konstruksi realitas adalah bahasa, baik dalam wujud verbal (kata-kata lisan /tulisan) maupun nonverbal (gambar, foto, grafik, tabel atau angka). Pemilihan kata, struktur bahasa, cara penyajian serta penampilan sebuah teks dalam menyusun fakta/narasi berita dapat menentukan bentuk konstruksi realitas yang akan menghasilkan makna tertentu. Fakta dan makna yang terkonstruksi dalam berita sangat tergantung pada peta konsep dan mental yang ada di kepala si wartawan selaku konstruktor berita. Karena peta konsep dan mental si wartawanlah yang sesungguhnya terlibat dalam pembentukan fakta dan pendefinisian makna tentang bagaimana, dengan cara apa, dan untuk tujuan (kepentingan) apa sebuah berita ditulis dan disajikan (Eriyanto, 2011).

Hasil konstruksi realitas sosial tersebut dalam konteks media merupakan *frame* berita, sebuah ide pengorganisasian pusat narasi atau alur cerita yang memberikan makna pada serangkaian peristiwa yang sedang berlangsung, yang memberi petunjuk tentang apa yang menjadi isu kontroversi sebagaiesensi/inti dari permasalahan. *Frame* berita juga berfungsi sebagai rutinitas kerja bagi jurnalis yang memungkinkan wartawan untuk dengan cepat mengidentifikasi dan mengklasifikasikan informasi dan mengemasnya dalam teknik tertentu untuk disampaikan kepada khalayak (Negara& Rusadi, 2020).

Framing mengacu pada prinsip konstruksi, dimana realitas difahami dan dimaknai darisuduttertentu. *Framing* membantu wartawan dalam mendefinisikan masalah, menyusun interpretasi kausal, membuat evaluasi, mengonstruksi keputusan moral serta menawarkan rekomendasi (Gitlin, 1980). Dalam membuat suatu penilaian, komunikator (penulis; editor) dipandu oleh sistem kepercayaan mereka, dan keputusan tersebut kemudian diwujudkan dalam teks dengan atau tanpa adanya kata kunci (frase, gambar, *stereotype*, sumber, kalimat) atas wacana yang menyediakan kerangka tematis untuk memperkuat fakta atau penilaian. Dalam *framing*, apa yang harus dihilangkan/disamarkan sama pentingnya dengan apa yang harus disertakan/ditonjolkan dari sebuah teks berita (Entman, 1993).

Sementara bagi Edelman (1993), sebuah realitas dapat dibingkai sesuai dengan apa yang kita tafsirkan; karena realitas sosial potensial diubah dengan cara dimana pengamatan dibingkai dan dikategorikan. Sebuah realita yang sama bisa saja menjadi berbeda ketika dibingkai dan dikategorikan secara berbeda (Edelman, 1993). Sebab, apa yang kita lihat, ketahui, fahami, dan maknai tentang realitas tergantung dari bagaimana kita melihat, memahami, dan menafsirkan realitas tersebut (Eriyanto, 2011). Adelman memperkenalkan satu metode/teknik analisis dalam kajian *framing* yang digunakan untuk memahami praktik bahasa dan penggunaan simbol politik dalam komunikasi. Edelman mengklasifikasi teori *framing*-nya ke dalam empat perangkat analisis berikut.

Tabel 1. Elemen Analisis *Framing* Murray Edelman

Elemen	Makna dan Fungsi
Kategorisasi	- <i>Frame</i> (bingkai berita) digunakan untuk memaknai dan menafsirkan sebuah realitas.
	- Abstraksi dan fungsi pikiran; digunakan sebagai alat untuk memahami relitas yang hadir dalam pikiran khalayak.
	- Kekuatan besar untuk memengaruhi kesadaran publik; atau sebuah upaya terencana dan sistematis untuk menyentuh alam bawah sadar publik.
	- Teknik penghalusan makna kata (<i>eufimisme</i>), yang lebih halus dari proraganda.
	- Strategi konstruksi yang digunakan wartawan/media (konstruktor berita) melalui praktik

	bahasa yang kemudian diaplikasikan dalam penyajian teks/penulisan narasi berita.
Ideologi	<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan bahasa (frasa, kata, kalimat) atau wacana untuk tujuan/kepentingan tertentu. - Cara realitas diklasifikasikan, dikategorisasikan melalui teknik penandaan, penggunaan simbol, citra atau representasi tertentu. - Teknik penyajian teks berita agar narasi berita yang disajikan terlihat wajar dan rasional, melalui praktik bahasa yang telah dipilih, diseleksi, dan disusun sedemikian rupa untuk memengaruhi cara realitas berita dicitrakan melalui tanda, simbol dan representasi tertentu. - Teknik bagaimana bahasa digunakan sebagai instrumen untuk memperkuat pandangan, prasangka, dan kebencian kepada objek tertentu.
Rubrikasi	<ul style="list-style-type: none"> - Bagaimana suatu peristiwa dikategorisasikan dalam skema peristiwa atau rubrik tertentu. - Bagaimana fakta diklasifikasikan; bagaimana realitas didefinisikan; bagaimana peristiwa dilihat, dijelaskan atau ditempatkan. - Rubrikasi harus menghindari miskategorisasi realitas yang ingin dikonstruksi, karena rubrikasi berkaitan dengan skema pembentukan persepsi publik tentang realitas.
Klasifikasi	<ul style="list-style-type: none"> - Klasifikasi tidak hanya berdampak mempengaruhi, akan tetapi juga menentukan emosi (sentimen) khalayak saat mereka melihat suatu isu atau peristiwa. - Klasifikasi (dan kategorisasi) sangat berhubungan dengan bagaimana realitas dipahami dan dimengerti serta apa yang seharusnya ditekankan, ditonjolkan, disamarkan atau dihilangkan pada khalayak dalam melihat suatu isu/peristiwa.

Sumber: Edelman (1993); Eriyanto (2011).

Bagi Edelman (1993), *framing* atau pembedaan sebangun dengan prinsip ‘kategorisasi’ karena kategorisasi berfungsi sebagai abstraksi dari konsepsi pikiran, yang membantu manusia untuk memahami realitas sosial yang beragam, kompleks, dan rumit menjadi realitas yang lebih bermakna, sederhana, dan mudah dipahami. Dalam teknis pemberitaan, kerap terjadi, saat para wartawan meliput berita yang sama, namun menggunakan sudut pandang yang berbeda dalam melihat peristiwa, akan menghasilkan perbedaan dalam penulisan berita. Pasalnya, peristiwa yang dilihat telah bercampur dengan subjektivitas sebagai hasil pemaknaan yang dilatari oleh konsepsi pikiran (dan mental) si wartawan. Edelman menyebut proses ini sebagai *framing*, dan mensejajarkan konsep *framing* dengan konsep ‘kategorisasi’ (Eriyanto, 2011).

Kajian potensi korupsi dana bansos di masa pandemi Covid-19 ini juga mengaitkan antara teori *framing* dan relasinya dengan konsep aktor politik-media-khalayak, teori institusional, dan konsep *regain public trust on public institutions*. Ditinjau dari sisi teori aktor politik dan relasinya dengan *framing* media, para pejabat negara (pusat maupun daerah) yang pernyataannya akan dianalisis, dalam konteks politik, *positioning* dirinya tidak melulu dilihat semata sebagai pejabat publik, akan tetapi juga harus ditempatkan sebagai aktor politik yang secara aktif saling bersaing dalam memerebutkan makna terkait citra diri dan citra kebijakan (institusi)-nya dalam ruang pemberitaan media massa.

Pasalnya, secara teoritis, aktor politik adalah entitas yang berperan penting dalam menyebarkan berbagai bentuk *frame* pemberitaan peristiwa sosial politik, sehingga penafsiran dan pemaknaan atas berbagai peristiwa sosial politik yang tersaji dalam teks pemberitaan media bisa teresonansi dan memberi dampak bagi kehidupan sosialpublik (termasuk dalam wacana potensi korupsi dana bansos). Sementara elemen khalayak terkait dengan sumber dukungan bagi pembentukan opini publik di antara para pejabat selaku pemegang kendali institusi publik. Studi Jamil (2014) menunjukkan keterkaitan signifikan antara elemen pejabat negara (selaku aktor politik) dengan peran/fungsimedia serta posisi khalayak. Relasi ketiga elemen itu merupakan satu kesatuan utuh dalam konteks ‘wacana’ yang dipertarungkan di pasar bahasa—dan kerap berkompetisi secara intens di ruang pemberitaan media.

Di sisi lain, teori institusional berasumsi, bahwa setiap institusi akan bertindak sesuai dengan tujuan dan kepentingan terbaiknya, sebagaimana agen (aktor politik) yang melakukan tindakan untuk kepentingan terbaik bagi dirinya. Asumsi teori ini juga melihat kepentingan kehidupan kelompok sebagai alasan untuk merubah motivasi, dari motivasi kepentingan agensi (aktor/individu) ke motivasi kepentingan institusional (DiMaggio & Powell, 1988). Dalam *Why Major Institutions Lost Public Trust, and How They Can Gain It Back* (2017), Shane Snow menjelaskan bahwa institusi publik yang dalam beberapa tahun terakhir ini tengah mengalami penurunan kepercayaan publik adalah fenomena yang terjadi di banyak negara (seperti KPK dan Polri di Indonesia). Menurut Snow, sejak tahun 1958 terdapat tren dimana institusi publik di berbagai negara demokrasi menghadapi situasi *public distrust* yang akut. Jika *trust* publik atas institusi mengalami tensi penurunan, maka persepsi atas fungsi negara ini akan melekat kuat di benak publik dan sulit untuk dirubah.

Snow (2017) menekankan, bahwa di era pos modern yang disruptif dengan tingkat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang kian dinamis, canggih, dan interaktif, institusi publik punya kesempatan untuk meraih kembali *trust* publik. Snow menyoroti pentingnya peran pers (media) dalam men-*support* kinerja (komitmen) institusi publik. Di negara yang menganut sistem demokrasi (seperti Indonesia) penting untuk memosisikan pers sebagai mitra strategis negara (terutama untuk deseminasi informasi atau komunikasi publik kasus-kasus sensitif, seperti potensi korupsi dana bansos). Artinya, *statement* Presiden Jokowi yang diwartakan media massa sesungguhnya bisa menjadi strategi '*public relations*' pemerintah untuk meraih kembali kepercayaan publik (*regain of public trust*); karena pemerintah selama ini dianggap 'tidak serius' dalam menangani kasus-kasus korupsi besar.

Melemahnya *public trust* yang menggerogoti institusi (negara) bisa disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya faktor pergeseran persepsi publik yang terlanjur menilai secara politis, bahwa institusi KPK di era Jokowi sedang 'dilemahkan' terkait komitmen pemberantasan korupsi. Konteks pergeseran persepsi publik ini tentu menarik untuk ditelaah, mengingat kesenjangan persepsi dan *gap* emosional antara aktor institusi negara dan publik ini harus segera dipulihkan (Snow, 2017). Dalam konteks *public trust*, pemerintah Jokowi tentu perlu mengonstruksi (menata kembali) penggunaan bahasa, simbol, citra, atribut, dan representasi tertentu yang bisa merajut kembali *mutual trust* antarainstitusi negara dan publik, atau sebaliknya—dengan melibatkan peran media sebagai agen mediasi.

Mengutip Paul Zak dalam *The Neuroscience of Trust* (2017), kondisi *regain of public trust* dapat dilakukan melalui aktivitas atau perilaku yang dapat memproduksi *oxytocin* (sejenis hormon yang dihasilkan tubuh manusia di dalam otak). Produksi *oxytocin* adalah mekanisme yang dengannya manusia memutuskan bahwa institusi publik cukup *make sense* untuk kembali dipercaya (*regain of public trust*). Menurut Zak, semakin banyak *trust* yang diterima institusi negara dari pengirim (seperti pers atau media massa) kepada publik, maka semakin tinggi produksi *oxytocin* (berita) yang dihasilkan oleh otak pengirim (yakni terbentuknya persepsi positif publik sebagai hasil resonansi berita yang diproduksi media massa). Konteks ini relevan dengan kasus yang dihadapi institusi negara yang di era pandemi saat ini tengah menghadapi problem serius: tingginya tingkat kecurigaan (*mistrust*) dan ketidakpercayaan publik (*public distrust*) pada institusi negara dan para pejabatnya.

Potensi korupsi dana bansos, di satu sisi, tentu menjadi perhatian (*attention*) pemerintah pusat (terutama presiden, KPK dan Polri) kepada para pihak yang telah diberi mandat untuk menyalurkan dana bansos secara *prudent*, transparan, akuntabel, efektif, dan tepat sasaran. Di sisi lain, 'ancaman' pemerintah dan penegak hukum pada para oknum yang berpotensi mengorup dana bansos tentu akan menjadi sarana dukungan bagi pemerintah dalam meraih simpati publik. Sebagai

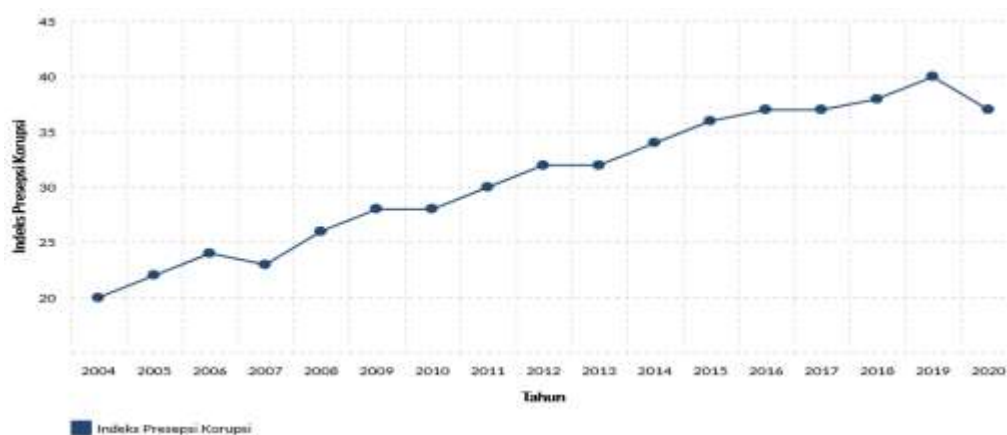
realitas politik dan fakta hukum, potensi korupsi dana bansos tentu menarik perhatian berbagai media untuk diwartakan. Sebab, wacana korupsi terkait dengan aspek nilai berita (*news value*) ditinjau dari sisi tampilan isi (*content*)-nya, sisi aktor (person/pelaku)-nya maupun dari sisi jabatan/kedudukan yang diemban para aktor/pelakunya (*prominence; eminence*); disamping aspek *material-event* atau sifat kekhususan (*extraordinary*) kasusnya, serta sisi kerugian keuangan negara yang ditimbulkannya.

Jika kita telusuri, secara leksikal ‘potensi’ adalah “kemampuan, kekuatan, kesanggupan, atau daya yang punya kemungkinan untuk dikembangkan” (KBBI, 2008). Sementara ‘korupsi’ adalah penggunaan kekuasaan secara diam-diam, dengan tujuan merugikan kekuasaan yang sah dan menguntungkan orang luar (Lubis & Scott, 1995); atau penggunaan jabatan untuk keuntungan pribadi (Klitgaard, 2000); atau praktik *abuse of power* yang dilakukan oleh pemimpin untuk meraih keuntungan pribadi atau untuk mempertahankan kekuasaan (Amundsen, 1999).

Dalam konteks hukum, korupsi adalah produk lemahnya penegakan hukum dan pengawasan publik atas praktik kekuasaan negara. Dua kelemahan ini muncul akibat buruknya transparansi dan akuntabilitas pemerintah (Alkotsar, 2009). Penyalahgunaan distribusi (seperti korupsi dana bansos) kepada rakyat juga dapat dikategorikan sebagai bentuk korupsi politik, yakni bentuk penyalahgunaan amanat, mandat, dan otoritas yang dipercayakan oleh rakyat. Dalam konteks teori keadilan, korupsi politik akan memberi dampak sistemik, yakni terganggunya fungsi pemerataan dan keadilan bagi rakyat—baik keadilan yang bersifat distributif (berbasis asas proporsionalitas) maupun keadilan yang bersifat komutatif (berbasis asas kesamaan; tanpa perbedaan) (Rawls, 1999; Hasanuddin, 2018).

Korupsi politik bisa dilatari oleh beragam motif, seperti: (1) penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh para penyelenggara kekuasaan negara; (2) tindakan itu sedari awal ditunjukkan dengan menggunakan pengaruh politik atau ekonomi; (3) uang dari hasil kejahatan diinvestasikan untuk kegiatan/aktivitas politik; (4) adanya niat (motif) yang diwujudkan dalam bentuk tindakan atau perbuatan tertentu yang dapat dikualifikasi sebagai suatu kepentingan politik; (5) interpretasi terhadap pengertian politik, aktivitas politik, dan kepentingan yang ditafsirkan di dalam berbagai pertimbangan hukum (Alkotsar, 2009); dan dalam banyak kasus (korupsi politik) selalu ada peran korporasi yang dijadikan sarana atau objek kejahatan, yang bersekutu dengan pemegang otoritas politik secara terorganisir, solid, dan terintegrasi (Widjojanto, 2017).

Grafik 1. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia (2004-2020)



Sumber: Transparency International (Lokadata, 2021)

Grafik di atas menunjukkan, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia dari tahun 2004 hingga tahun 2019 terus menaik, dan hanya menurun sedikit di tahun 2020, yakni di angka 37. Indeks tersebut menjadikan Indonesia berada di peringkat ke-102 negara terkorup di dunia.

Terkait konsepsi media baru, media online (*online media*), media siber (*cybermedia*), atau media internet (*internet media*) adalah jenis-jenis *new media* yang tampil secara *online* di situs web (*website*) internet. Per definisi, media baru adalah aktivitas media berbasis telekomunikasi dan multimedia (komputer dan internet). Portal berita, *website* (situs web, termasuk blog dan media sosial, seperti *facebook*, *twitter*, *instagram*, *whatsapp*, *youtube*, *line*, atau *linkedin*), radio online (radio *streaming*) atau TV *online* (televisi *streaming*) dan email masuk dalam kategori media *online* (Romli, 2012).

Ciri utama media baru adalah: (1) *interactivity* (dapat diakses oleh individu sebagai penerima maupun pengirim pesan); (2) *social presence/sociability* (bersifat *sense of personal contact*); (3) *media richness* (bisa digunakan sebagai kerangka referensi untuk menjembatani perbedaan, meminimalkan ambiguitas, memberi isyarat, sensitif, dan lebih personal antar para pengguna); (4) *autonomy* (pengguna dapat mengendalikan isi dan berposisi independen terhadap sumber); (5) *playfulness* (digunakan untuk *entertainment* dan *pleasure*); (6) *privacy* (penggunaan medium/content yang bisa dipilih sesuai selera pengguna); (7) *personalization* (bersifat personal dan unik); dan (8) kegunaan yang beragam dengan karakter terbuka dan bersifat tak terbatas (McQuail, 2011; Ardianto, dkk., 2011).

[Situs web](#) atau Portal *web* memiliki perangkat yang menyediakan kemampuan tertentu, yang dibuat sedemikian rupa untuk mengikuti selera para pengunjungnya. Kemampuan portal *web* yang lebih spesifik adalah penyediaan kandungan (*content*) informasi atau berita yang dapat diakses menggunakan beragam perangkat teknologi informasi modern, seperti [personal computer](#) (PC), *notebook*, [PDA](#) (*personal digital assistant*), atau [telepon genggam](#) (*hand phone*) (Mubarak, 2018).

Sementara portal berita *online* adalah bagian dari *web* portal. *Web* portal bisa berdiri sendiri atau merupakan konvergensi dari media cetak dan elektronik. Portal berita *online* adalah *website* yang memuat konten berita dan informasi terkini dari bermacam kategori peristiwa, dimana beragam bentuk informasi terbaru dan terkini bisa diakses melalui *website* (portal berita). *Tempo.com* misalnya, merupakan portal berita yang memiliki edisi cetak (*print edition*), seperti *Koran Tempo* dan majalah *Tempo*. Sementara *vivanews.com*, *okezone.com*, dan *detik.com* adalah portal berita khusus yang tidak memiliki versi edisi cetak. Sejak tahun 1996, *tempo.co*, *vivanews.com*, *okezone.com*, dan *detik.com* adalah empat dari lima portal berita (selain *kompas.com*) yang cukup populer dan memiliki rating teratas dengan *range* dan *pageview* tertinggi di Indonesia versi *Alexa.com* (Arifin, 2012).

Metode Penelitian

Studi ini menggunakan paradigma konstruksi sosial. Sementara analisis *framing* merupakan varian dari teori analisis teks media (kualitatif) yang berada di bawah payung paradigma konstruksi sosial. Kajian ini bermaksud menganalisis bagaimana praktik bahasa digunakan dalam penulisan teks beritanya yang dikonstruksi oleh portal berita *vivanews.com*, *okezone.com*, *detik.com*, dan *tempo.co*. Penggunaan paradigma konstruksi sosial dengan model analisis *framing* Edelman dianggap relevan untuk menjawab pertanyaan studi: bagaimana portal berita *vivanews.com*, *okezone.com*, *detik.com* dan *tempo.com* mengonstruksi pemberitaan potensi korupsi dana bansos yang diwacanakan pemerintah.

Secara lebih spesifik, studi ini berupaya mengidentifikasi beberapa hal berikut: (1) memeriksa unsur *framing* dalam teks berita yang disajikan dalam pemberitaan keempat portal berita online terkait potensi korupsi dana bansos ditelusuri dari keempat perangkat analisis *framing*

Edelman; (2) menyingkap makna bahasa, yakni wacana apa yang bersemayam dalam elemen *kategorisasi, ideologi, rubrikasi, dan klasifikasi*; (3) menganalisis relasi konstruksi wacana potensi korupsi dana bansos dengan konteks sosial budaya tempat wacana (teks berita) di produksi; (4) menelaah penggunaan pilihan kata/kalimat (diksi), *term*, kosa kata, dan gaya penulisan yang digunakan untuk mengungkap konstruksi seperti apa yang melatari *framing* berita terkait isu potensi korupsi dana bansos sebagai wujud dari praktik wacana di keempat portal berita; (5) elemen penggunaan bahasa (praktik wacana) yang hendak dikaji meliputi: *kategorisasi* (bagaimana *frame* digunakan untuk melihat peristiwa), *ideologi* (bagaimana bahasa digunakan sebagai praktik wacana untuk tujuan/kepentingan tertentu), *rubrikasi* (bagaimana suatu isu dikategorisasikan dalam skema peristiwa tertentu), dan *klasifikasi* (bagaimana suatu peristiwa dipahami dan dikomunikasikan).

Untuk menghasilkan pemahaman yang lebih utuh, analisis atas fenomena potensi korupsi dana bansos dari keempat portal berita (*vivanews.com, okezone.com, detik.com, dan tempo.co*) juga akan ditelisik dari asumsi-asumsi teori aktor politik dan relasinya dengan media dari Jamil (2014), teori institusional dari DiMaggio dan Powell (1988), dan konsep *regain of public trust* dari Snow (2017).

Perangkat analisis yang digunakan untuk menjelaskan pertanyaan di atas mengacu pada jenis penelitian kualitatif berbasis teks dengan metode analisis deskriptif-interpretif. Objek kajian adalah portal berita *vivanews.com, okezone.com, detik.com, dan tempo.co*; sementara subjek analisis adalah teks berita yang teksasinya terkait dengan isu potensi korupsi dana bansos di keempat portal berita.

Penggunaan pendekatan analisis interpretif karena studi ini mendasari objek analisisnya pada teks berita yang memandang realitas sosial (wacana, isu atau narasi) sebagai sesuatu yang bersifat dinamis, subjektif, dan transaksional. Analisis interpretif bertujuan untuk memberi penilaian dan memaknai teks berita (realitas sosial) sebagai hasil konstruksi sosial (penafsiran wartawan dan/atau pemaknaan media). Parspektif interpretif meyakini bahwa wartawan/media adalah individu/institusi yang berkesadaran dan memiliki motif atau kepentingan dalam bertindak (Rahardjo, 2018).

Adapun pemilihan sampel teks berita bersifat purposif. Purposivitas pemilihan sampel teks berita dilatari oleh argumen bahwa keempat teks berita (yang dipilih satu teks berita dari setiap portal beritamedia online) dianggap cukup representatif untuk mewakili sampel kajian.

Tabel 2. Teks Berita Potensi Korupsi Dana Bansos di Empat Portal Berita

Media	Tanggal Terbit	Rubrik	Judul Teks Berita
<i>Vivanews.com</i>	Selasa, 14 April 2020	Fakta	“Anggaran Bantuan Sosial PSBB Jakarta Berpotensi Dikorupsi, Benarkah?”
<i>Okezone.com</i>	Rabu, 29 April 2020	Nasional	“KPK Petakan Titik Rawan Korupsi saat Pandemi Covid-19”
<i>Detik.com</i>	Rabu, 29 April 2020	Berita	“Ketua Komisi III Minta KPK Awasi Dana Corona: Kerja Sama dengan Kejaksaan”
<i>Tempo.co</i>	Selasa, 16 Juni 2020	Nasional	“Ada Korupsi Dana Bansos, Kapolri: Saya Sikat”

Sumber: Khalisotussurur (2020); Akhmad (2020); Zhacky (2020); Rahma (2020)

Analisis *framing* dalam kajian ini dibatasi pada level analisis naskah teks berita (*single level analysis*). Melalui *single level analysis*, kajian ini hanya fokus mengeksplorasi wacana pada level *framing* berita terkait potensi korupsi dana bansos yang manifestasinya tereksresi dan terrepresentasi pada praktik bahasa yang dikonstruksi oleh keempat portal berita sampel.

Teknik dokumentasi digunakan sebagai metode pengumpulan data. Penggunaan teknik ini diawali dengan pengumpulan data primer berupa kepingan-kepingan teks berita dari keempat portal berita yang menjadi objek kajian. Data yang berhasil terkumpul kemudian diklasifikasi dan dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif (deskriptif-interpretif).

Sumber data lain yang digunakan dalam kajian ini adalah data sekunder (jurnal, buku, dan dokumen) dan data tersier (hasil telaah yang tersaji di *website*, portal berita atau *blog*) yang dianggap relevan dengan kebutuhan kajian. Adapun teknik analisis data dilakukan melalui tahapan berikut: (1) pengumpulan dan klasifikasi data; (2) identifikasi dan kategorisasi data yang disusun (ditabulasi) ke dalam satuan-satuan analisis; (3) interpretasi dan analisis teks berita; dan (4) penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Tabulasi Teks Berita

Tabel 3. Framing *Berita vivanews.com* (Teks Berita 1)

Judul: "Anggaran Bantuan Sosial PSBB Jakarta Berpotensi di Korupsi, Benarkah?"

Kategorisasi	P-1: "Beredar pesan berantai melalui aplikasi <i>whatsapp</i> soal hasil perhitungan bantuan sosial pembatasan sosial berskala besar (PSBB) Covid-19 Pemprov DKI Jakarta." P-1: "Adapun bantuan sosial yang diberikan terdiri dari beras 5 kg, minyak goreng 1 liter, sarden 2 kaleng 198 gram, biskuit 2 pak, 2 sabun batang, dan masker kain 2 pcs." P-2: "Bila dihitung, maka bantuan sosial tersebut berjumlah Rp115.000. Lalu, bantuan akan diberikan sebanyak 4 kali selama sebulan yang ditotal sebanyak Rp460.000." P-3: "Informasi tersebut menuding total bantuan pemerintah pusat sebesar Rp.600.000. Melihat bantuan sosial di DKI Jakarta, ada selisih Rp140.000 diperkirakan terjadi potensi korupsi sebesar Rp168 miliar dengan target bantuan pada 1,2 juta warga miskin." P-8: "... Kementerian Sosial akan menanggung 2,6 juta warga miskin dan rentan miskin di DKI Jakarta selama PSBB sisanya ditanggung Pemprov DKI Jakarta...."
Ideologi	P-10: "... selisih dan potensi korupsi sebesar Rp.168 miliar tak benar. Sebab, bantuan sosial bersumber dari realokasi APBD DKI Jakarta, bukan dari pemerintah pusat."
Rubrikasi	Menempatkan judul berita(dan narasi berita) dalam rubrik Fakta
Klasifikasi	P-6: "...bantuan sosial yang disalurkan tersebut bersumber dari realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta, bukan dari pendanaan pemerintah pusat. Baik Pemprov DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat secara bersama memberi bantuan, tapi dengan mekanisme, bentuk, dan waktu yang berbeda." P-7: "... Pemprov DKI Jakarta memastikan telah melakukan pengumpulan data, verifikasi, dan validasi data sesuai ketentuan yang berlaku juga menyediakan keterbukaan informasi publik soal daftar penerima bantuan sosial sesuai UU Keterbukaan Informasi Publik."

Sumber:Data diolah peneliti(2020)

Tabel 4. Framing *Berita okezone.com* (Teks Berita 2)

Judul: "KPK Petakan Titik Rawan Korupsi saat Pandemi Covid-19"

Kategorisasi	P-1: "Ketua KPK Filri Bahuri telah memetakan titik rawan terjadinya tindak pidana korupsi saat pandemi Covid-19. Salah satunya adalah penyaluran dana bantuan sosial (bansos)." P-3: "... titik rawan korupsi: pengadaan barang dan jasa, sumbangan pihak ketiga, pengalokasian anggaran baik APBN dan APBD hingga bansos." P-7: "Ada tiga bentuk penyimpangan yang terjadi dalam pandemiCovid-19 ini sumbangan fiktif, <i>exclusionerror</i> , <i>inclusion error</i> , dan kualitas serta kuantitas yang berubah."
Ideologi	P-5: "Karena ini (dana bansos) menjadi hak rakyat harus sampai, tepat guna, tepat jumlah, dan juga tepat sasaran."
Rubrikasi	Menempatkan judul berita (dan narasi berita) dalam rubrik Nasional

Klasifikasi	P-4: “KPK akan terus melakukan pengawasan dan memberikan perhatian lebih terhadap program bansos” P-8: “KPK telah membentuk satgas penyelidikan yang bertugas memonitor terkait dengan penggunaan, penyalahgunaan dan penyaluran anggaran Covid-19.”
-------------	---

Sumber: Data diolah peneliti (2020)

Tabel 5. *Framing* Berita *detik.com* (Teks Berita 3)

Judul: “Ketua Komisi III Minta KPK Awasi Dana Corona: Kerja Sama dengan Kejaksanaan”

Kategorisasi	P-1: “Komisi III DPR RI meminta KPK aktif mengawasi penggunaan anggaran penanganan wabah virus corona dan (bisa) bekerjasama dengan kejaksanaan dalam mengawasi penggunaan anggaran tersebut.” P-2: “KPK harus berperan aktif melakukan pengawasan (karena) jumlah anggaran penanganan Covid-19 sangat besar, mencapai Rp 405 triliun.” P-3: “(Komisi III DPR juga) mengingatkan KPK untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah.”
Ideologi	P-5: “KPK memastikan akan mengawasi penyaluran bansos meminta pemerintah transparan perihal data penerima bansos”
Rubrikasi	Menempatkan judul berita (dan narasi berita) dalam rubrik Berita
Klasifikasi	P-7: “Apakah mungkin (KPK sanggup) mengawasi, mencegah maupun (melakukan) penindakan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang ada dalam anggaran covid ini.” P-7: “(agar fungsi pengawasan KPK berjalan maksimal, maka) KPK harus mengadakan kerjasama dengan kejaksanaan, karena kejaksanaan punya infrastruktur sampai ke kabupaten.”

Sumber: Data diolah peneliti (2020)

Tabel 6. *Framing* Berita *tempo.com* (Teks Berita 4)

Judul: “Ada Korupsi Dana Bansos, Kapolri: Saya Sikat”

Kategorisasi	P-1: “Kepolri Jenderal Idham Azis bakal menindak tegas pihak yang menyelewengkan dana bantuan sosial di masa pandemi Covid-19” P-2: “Langkah itu Idham ambil sebagai tindaklanjuti atas perintah Presiden Joko Widodo yang meminta aparat hukum untuk 'menggigit' oknum pejabat yang korupsi di tengah pandemi Covid-19” P-3: “.... dalam situasi kondisi pandemi seperti ini apabila ada yang menyalahgunakan maka Polri tidak pernah ragu untuk 'sikat' dan memproses pidana.”
Ideologi	P-6: "Presiden sudah mempermudah proses pencairan dana covid.”
Rubrikasi	Menempatkan judul berita (dan narasi berita) dalam rubrik Berita
Klasifikasi	P-4: “Idham Azis telah membentuk Satuan Tugas di bawah pimpinan Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo, yang akan menindak oknum jika terbukti menyalahgunakan dana Covid-19.” P-5: “Ia mengingatkan semua pihak agar tak menyalahgunakan kelonggaran aturan dana covid dengan tujuan memperkaya diri.” P-6: “Awas, siapa saja yang ingin bermain curang, akan saya sikat. Hukumannya sangat berat,” ucap Idham.”

Sumber: Data diolah peneliti (2020)

Analisis dan Interpretasi

Melalui penggunaan teori *framing* Edelman, hasil tabulasi keempat teks berita di atas akan dianalisis secara deskriptif-interpretif melalui interpretasi atas makna bahasa yang terkandung dalam elemen *kategorisasi* (penggunaan *frame* berita untuk melihat peristiwa), elemen *ideologi* (penggunaan bahasa sebagai praktik wacana), elemen *rubrikasi* (kategorisasi isu dalam skema peristiwa tertentu), dan elemen *klasifikasi* (bagaimana suatu peristiwa dipahami dan dikomunikasikan).

Kategorisasi. Elemen kategorisasi pada judul teks berita 1 (*Anggaran Bantuan Sosial PSBB Jakarta Berpotensi di Korupsi, Benarkah?*) terlihat pada p-1, p-2, p-3 dan p-8. Keempat paragraf

digunakan sebagai fungsi abstraksi dari pikiran/konsep penulisan berita *vivanews.com* agar mudah dipahami khalayak pembaca. Kalimat pada judul berita menunjukkan *frame* berita diakhiri dengan kalimat tanda tanya (?). Ini menunjukkan adanya unsur kontroversi (perdebatan) dalam penulisan fakta berita terkait ‘penyaluran dana bansos oleh Pemprov DKI Jakarta.’ P-1 memberi tekanan pada ‘pesan berantai *whatsapp*’ dan ‘jenis-jenis barang kebutuhan pokok’ sebagai latar informasi penulisan berita. P-2 dan p-3 memberi penonjolan pada ‘perbedaan besaran anggaran’ (selisih jumlah angka bantuan) sebagai fakta berita. P-8 memberi penonjolan pada ‘peran penting Kementerian Sosial sebagai pemberi bantuan terbesar’ yang digunakan sebagai kalimat keterangan (pelengkap) agar kategorisasi berita terlihat koheren (lebih menyatu) dan konjungtif (terkait langsung) dengan makna ‘(ada) potensi korupsi (dalam penyaluran) dana bansos pada Pemprov DKI Jakarta.’

Kategorisasi berita *vivanews.com* ingin menunjukkan bahwa ‘potensi korupsi dana bansos’ (baik besaran dana/jenis barang yang akan disalurkan) masih perlu dibuktikan kebenaran (faktualitas)-nya, karena narasi berita masih bersifat kontroversi (teks berita hanya mengandalkan sumber informasi dari pesan berantai yang beredar di *whatsapp*). Fungsi abstraksi dari kategorisasi berita ini sepertinya ditujukan untuk merespon dua hal: (1) menyentuh kesadaran publik, bahwa informasi berita bersifat ‘*opinion news*’ (tidak menjelaskan sumber kutipan resmi dalam penulisan berita); (2) memperjelas posisi berita, bahwa narasi ‘potensi korupsi dana bansos di Pemprov DKI Jakarta’ bernuansa *hoax* karena sumber berita yang diperoleh bersandar sepenuhnya dari pesan berantai yang beredar di lini *whatsapp*. Sebab, beberapa hasil studi menunjukkan bahwa pesan berantai melalui aplikasi *whatsapp* seringkali digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk menyebarkan kabar bohong (*hoax*) (Pramelani, 2018; Ilahi, 2018; Cahyani, 2019).

Ideologi. Elemen ideologi berita terdapat dalam paragraf 10 yang menyebut “*potensi korupsi sebesar Rp.168 miliar tak benar, karena bansos bersumber dari realokasi APBD DKI Jakarta, bukan dari pemerintah pusat.*” Elemen ini menunjukkan bahwa: (1) wacana potensi korupsi dana bansos adalah bentuk praktik bahasa untuk menyeleksi isu dominan (potensi korupsi dana bansos) melalui teknik marjinalisasi posisi Pemprov DKI Jakarta di satu sisi, dan penonjolan posisi pemerintah pusat (Kementerian Sosial) terkait penyaluran dana bansos pada sisi lain; (2) wacana potensi korupsi dana bansos dijadikan pesan (gagasan tertentu) terkait pandemi Covid-19 sebagai wacana dominan untuk: (a) mendelegitimasi citra politik Anies Baswedan (AB) sebagai pengendali utama Jakarta, (b) konstruksi wacana tandangan atas peningkatan citra dan popularitas politik AB selaku gubernur DKI Jakarta, (c) upaya penggeseran isu agar ‘citra kegagalan’ dalam penanganan Covid-19 tidak mengarah pada pemerintah pusat (namun pada kegagalan AB dan perilaku korup birokrasi Jakarta), dan (d) mengarahkan prasangka dan kebencian khalayak atas wacana potensi korupsi dana bansos kepada AB dan Pemprov DKI Jakarta. Studi A’yun dan Mudhoffir (2020) mengonfirmasi bahwa fenomena ‘pengalihan isu’ adalah strategi untuk menyelamatkan muka pemerintah pusat (dan Jokowi) yang dianggap gagal mengendalikan wabah [Covid-19](#) dan memproteksi hak-hak warga negara terdampak.

Rubrikasi. Elemen rubrikasi isu ‘potensi korupsi dana bansos’ ditempatkan *vivanews.com* dalam rubrik Fakta. Penempatan berita pada rubrik Fakta tidak semata-mata dilatari oleh pertimbangan teknis redaksi, akan tetapi merupakan strategi redaksi dalam penempatan skema berita (alur narasi) yang ingin dikonstruksi, yakni: (1) mengategorisasi isu ‘potensi korupsi dana bansos’ sebagai ‘opini’ (*opinion news*), bukan fakta berita (*straight news*); (2) skema peristiwa didefinisikan sebagai peristiwa ‘politik,’ bukan peristiwa ‘hukum’; (3) rubrikasi bertendensi menggiring opini agar publik secara definisional memaknai peristiwa berita sebagai fakta kegagalan pemerintah pusat, bukan fakta kegagalan Pemprov DKI Jakarta; (4) strategi agar publik memahami realitas ‘potensi korupsi dana bansos’ sebagai berita bermuatan ‘kontroversi,’ bukan

peristiwa berita yang utuh dan lengkap; dan (5) menghindari miskategorisasi dalam *frame* berita—karena rubrikasi punya implikasi konseptual dalam membentuk peta kognisi dan persetujuan khalayak terhadap isi berita (informasi) yang dibacanya.

Klasifikasi. Elemen *klasifikasi* berita terdapat dalam p-6 dan p-7, yang menonjolkan sumber alokasi dana bansos bagi warga DKI yang bersumber dari “*realokasi APBD DKI Jakarta, bukan dari pemerintah pusat*” (p-6); “*Pemprov DKI Jakarta juga memastikan telah melakukan pengumpulan data, verifikasi, dan validasi data sesuai ketentuan yang berlaku, serta menyediakan keterbukaan informasi publik terkait daftar penerima bansos sesuai UU Keterbukaan Informasi Publik*” (p-7). Klasifikasi berita menunjukkan ada upaya *counter discourse* dalam teks berita *vivanews.com* terkait sumber pendanaan, mekanisme bantuan, dan aspek keterbukaan informasi publik sebagai bentuk akuntabilitas (data dan angka) penyaluran bansos yang telah ditetapkan Pemprov DKI sebagai *standar operation procedure* (SOP) pada warga terdampak. Wacana tandingan ini penting untuk diklasifikasi tidak hanya untuk meluruskan opini publik terkait isu korupsi dana bansos, namun klasifikasi juga menentukan pelibatan emosi publik saat mereka menyaksikan peristiwa sensitif, seperti isu transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penyaluran dana bansos di masa pandemi. Studi IASC-MHPSS (2020) mengkonfirmasi, bahwa fenomena pandemi Covid-19 saat ini telah berkembang dari isu kesehatan dan sosial ke isu politik dan keamanan paling sensitif di tingkat global; yang memberi efek sistemik pada terganggunya kondisi psikososial, stigmatisasi sosial, mental-bipolar, dan emosi sosial.

Kategorisasi. Elemen kategorisasi pada judul teks berita 2 (*KPK Petakan Titik Rawan Korupsi Saat Pandemi Covid-19*) terlihat pada p-1, p-3, dan p-7. Ketiga paragraf digunakan *okezone.com* sebagai fungsi abstraksi pikiran (*frame*) agar makna berita lebih mudah dimengerti pembaca. Kalimat pada judul berita menunjukkan bahwa KPK telah berhasil memetakan titik rawan potensi korupsi dana bansos, termasuk proses penyalurannya (p-1). Sementara p-7 adalah strategi konstruksi, dimana titik rawan potensi korupsi didefinisikan dalam makna ‘fiktif’ (tidak nyata; bohong), *exclusion error* (orang yang berhak menerima manfaat tidak masuk dalam database sebagai penerima manfaat), dan *inclusion error* (orang yang tidak berhak menerima manfaat tapi masuk database sebagai penerima manfaat) disertai kalimat pelengkap ‘harus sampai,’ ‘tepat guna,’ ‘tepat jumlah,’ dan ‘tepat sasaran’ (p-3) sebagai bentuk penonjolan kata/kalimat (*selience*) agar kategorisasi berita terlihat konseptual, kohesif (bermakna), koheren (menyatu), dan konjungtif (terkait langsung) dengan objek masalah.

Kategorisasi berita bertujuan mengonstruksi keberhasilan KPK dalam mendefinisikan ‘peta titik rawan korupsi.’ Fungsi abstraksi dari kategorisasi berita *okezone.com* ini ditujukan untuk merespon keraguan publik atas ‘ketegasan sikap KPK’ sekaligus peningkatan citra KPK yang belakangan terjun bebas. Sebagai institusi negara garda depan dalam pemberantasan korupsi, Firli Bahuri (Ketua KPK) meraih momentum untuk menaikan citra diri dan citra institusinya (DiMaggio dan Powell, 1988)—dengan memanfaatkan situasi pandemi dan kegelisahan publik atas kinerja buruk pemerintah (Snow, 2017; Zak, 2017); Firli sesungguhnya tengah mengomunikasikan simbol-simbol terpilih kepada khalayak melalui media guna membangun kembali ‘harapan publik’ kepada pemerintah (Jamil, 2014).

Ideologi. Elemen ideologi berita terdapat dalam p-5 yang menyebut ‘(dana bansos) menjadi hak rakyat harus sampai, tepat guna, tepat jumlah, dan juga tepat sasaran.’ Elemen ideologi ini memberi penonjolan bahwa: (1) KPK *committed* untuk mengawasi potensi korupsi dana bansos guna meraih kembali kepercayaan publik kepada pemerintah sekaligus meningkatkan citra diri dan citra institusi KPK; (2) memanfaatkan isu potensi korupsi dana bansos untuk mengukuhkan kembali ‘wacana korupsi’ sebagai *public discourse* dalam rangka pemulihan citra KPK dari terpaan krisis eksistensi; (3) memarjinalisasi wacana ‘kegagalan pemerintah’ dalam menangani secara

efektif dampak pandemi; (4) membangun wacana tandingan (*counter discourse*) dengan menempatkan KPK sebagai pahlawan pengawas anti korupsi dan pihak-pihak tertentu sebagai korban (calon pelaku korupsi yang akan diawasi). Mengacu catatan ICW dan TII, sejak berada di bawah kepemimpinan Firli Bahuri, KPK memiliki 22 catatan buruk (baik di bidang penindakan, pencegahan, dan kebijakan internal) dan menjadi institusi yang sudah kehilangan kepercayaan rakyat (Aji, 2020).

Rubrikasi. Elemen rubrikasi isu ‘pemetaan titik rawan korupsi dana bansos’ ditempatkan *okezone.com* dalam rubrik Nasional. Peletakan berita pada rubrik Nasional dilatari oleh pertimbangan redaksi untuk memperkuat skema berita (alur narasi) yang ingin dikonstruksi, dengan strategi: (1) mengategorisasi berita sebagai isu yang berskala nasional; (2) skema peristiwa didefinisikan sebagai isu ‘politik’ dan ‘sosial; (3) rubrikasi bertendensi menggiring opini agar publik secara definisional memaknai peristiwa berita sebagai fakta keseriusan KPK (dan pemerintah) dalam mengawasi potensi korupsi dana bansos; (4) penonjolan *stratement* Ketua KPK sekaligus menyandarkan seluruh narasi berita dari pernyataan Ketua KPK; dan (5) ada miskategorisasi dalam *frame* berita, yakni bentuk penggiringan opini terkait peran penting KPK, baik dalam konteks pengawasan potensi korupsi maupun penyalurannya kepada warga terdampak. Rubrikasi memiliki implikasi konseptual dalam membentuk peta kognisi dan persetujuan khalayak terhadap isi berita (informasi) yang dibacanya.

Klasifikasi. Elemen *klasifikasi* berita terdapat dalam p-4 dan p-8 yang memberi penonjolan pada wacana “*pengawasan dan perhatian lebih KPK terhadap program bansos dan pembentukan satgas penyelidikan yang bertugas memonitor penggunaan, penyalahgunaan dan penyaluran dana bansos.*” *Klasifikasi* berita menunjukkan ada komitmen dan upaya serius KPK untuk mengawasi penyaluran dan penggunaan dana bansos bagi warga terdampak sebagai konstruksi (inti narasi) berita. Konstruksi ini digunakan *okezone.com* sebagai: (1) wacana tandingan (*counter discourse*) untuk meluruskan opini publik terkait citra KPK yang terlanjur diasumsikan melakukan ‘tebang pilih’ dalam konteks penanganan perkara dan penegakan hukum korupsi serta postur pimpinan KPK yang dianggap ‘kurang kredibel’; (2) rehabilitasi KPK hanya mungkin dicapai secara efektif jika KPK mampu melibatkan emosi publik untuk meraih kembali *public trust* atas citra diri dan eksistensi komisi anti rasuah ini (Snow, 2017). Studi ICW dan TII mengkonfirmasi, bahwa kinerja KPK periode Desember 2019-Juni 2020 (di bawah pimpinan Firli Bahuri) mengalami stagnasi cukup serius ditinjau dari kinerja sektor pengawasan, penindakan, dan internal organisasi. Kondisi ini memberi efek psikis bagi penurunan kewibawaan KPK di mata publik (Ramadhana & Nicola, 2020).

Kategorisasi. Elemen kategorisasi pada judul teks berita 3 (*Ketua Komisi III Minta KPK Awasi Dana Corona: Kerja Sama dengan Kejaksaan*) terlihat pada p-1, p-2, dan p-3. Ketiga paragraf digunakan *detik.com* sebagai fungsi abstraksi pikiran (*frame*) agar makna berita lebih mudah dipahami pembaca. Kalimat judul berita menunjukkan bahwa KPK diminta oleh Ketua Komisi III DPR untuk ‘bekerjasama’ dengan kejaksaan dan aktif melakukan pengawasan penyaluran dana corona (p-1); dan meminta KPK untuk terus ‘berkoordinasi’ dengan pemerintah pusat dan daerah (p7). Kategorisasi berita terlihat mengonstruksi wacana ‘keraguan Komisi III DPR’ terhadap KPK, dengan memberi tekanan pada kata ‘kerjasama,’ ‘efektivitas pengawasan,’ dan ‘koordinasi antar-instansi.’ Bisa disimpulkan bahwa Komisi III DPR secara psiko-politis ‘meragukan’ komitmen dan kinerja KPK.

Ideologi. Elemen ideologi berita bisa ditelisik dari kalimat ‘memastikan’ dan ‘transparansidata.’ Kedua elemen ini bisa dimaknai: (1) frasa ‘memastikan’ adalah bentuk penggiringan ‘opini positif’ citra KPK sebagai institusi penegak hukum yang serius dan *committed* dalam pengawasan potensi korupsi dana Covid-19; (2) frasa ‘pengawasan’ untuk mengukuhkan

‘ketegasan KPK’ menindak tegas siapa pun yang berniat mengorupsi dana Covid-19; (3) frasa ‘transparansi data’ untuk menggeser kecurigaan publik pada KPK—yang terlanjur diberi label negatif—sebagai institusi yang bekerja sesuai ‘arahan pemerintah’ atau berada di bawah ‘kendali presiden’; (4) upaya konstruksi wacana, dengan memosisikan pemerintah sebagai pihak yang patut ‘dicurigai,’ adalah bentuk *counter discourse* KPK; (5) mengarahkan prasangka dan kebencian publik pada pemerintah dan pihak lain yang dicurigai sebagai ‘pengganggu’ efektivitas proses penyaluran dana corona (*victim*). Temuan survei Indikator Politik Indonesia (2016) memberi petunjuk adanya motif ideologis KPK: bahwa sebagai institusi, KPK telah sejak lama menghadapi kegelisahan akut (penurunan tingkat kepercayaan publik) sejak wacana rencana revisi UU KPK dijadikan menu pemberitaan rutin media, terutama pasca terpilihnya Firli Bahuri, jenderal polisi aktif, sebagai pimpinan KPK (Barnie, 2020).

Rubrikasi. Elemen rubrikasi isu ‘pengawasan dana corona’ ditempatkan *detik.com* dalam rubrik Berita. Peletakan judul dan narasi berita pada rubrik Berita dimaksudkan untuk memperkuat skema berita (alur narasi) yang ingin dikonstruksi, dengan strategi: (1) mengategorisasi berita sebagai isu umum (*public issues*); (2) skema peristiwa didefinisikan sebagai isu ‘publik,’ bukan isu ‘hukum’ atau isu ‘kebijakan’; (3) rubrikasi bertendensi menggiring opini agar publik secara definisional memaknai peristiwa berita sebagai keseriusan KPK (dan DPR) dalam mengawasi penyaluran dana Covid-19; (4) penonjolan *statement* Ketua KPK dan Pimpinan Komisi III DPR sebagai sandaran dari seluruh narasi berita; dan (5) ada miskategorisasi dalam *frame* berita, yakni bentuk penggiringan opini terkait peran penting KPK, baik dalam konteks pengawasan dana maupun dalam penyalurannya kepada warga terdampak. Rubrikasi memiliki implikasi konseptual dalam membentuk peta kognisi dan persetujuan khalayak terhadap informasi yang mereka konsumsi.

Klasifikasi. Elemen *klasifikasi* berita terdapat dalam p-7 yang memberi penonjolan pada wacana “maksimalisasi fungsi KPK dalam mengawasi, mencegah, dan menindak (pelaku) penyimpangan anggaran covid melalui kerjasama KPK dengan kejaksaan.” Klasifikasi berita menunjukkan ada kekhawatiran Komisi III terhadap efektivitas KPK dalam melaksanakan fungsi pengawasan penyaluran dan penggunaan dana Covid-19 (sebesar 45 triliun) yang bisa berlangsung dalam beragam modus penyimpangan (Haliim dan Dwiranda, 2020; Aziz, 2017). Klasifikasi berita *detik.com* dapat dimaknai secara psiko-politik sebagai: (1) bentuk keraguan (ketidakpercayaan) Komisi III terhadap keseriusan KPK dalam mengawasi penyaluran dana Covid-19 (sebagai inti narasi berita); (2) bentuk keraguan (atau ketidakpercayaan) Komisi III terkait kredibilitas KPK bersikap adil (tidak tebang pilih) dalam menindak para pihak yang berpotensi menyalahgunakan anggaran Covid-19; (3) ada frasa penonjolan peran ‘kejaksaan’ sebagai mitra kerja KPK dalam mengawasi penyaluran dan penggunaan dana Covid-19 (frasa marjinalisasi posisi/peran KPK); (4) ada frasa penonjolan ‘pimpinan Komisi III’ dan ‘institusi Komisi III’ sebagai legitimasi peran pengawasan politik DPR atas kinerja KPK. Kendati relasi ‘politis’ DPR-KPK terlihat solid dipermukaan, namun DPR tetap berhati-hati terhadap tindak-tanduk KPK yang bisa ‘menyerang balik’ anggota DPR (Muttaqin & Susanto, 2018).

Kategorisasi. Elemen kategorisasi pada judul teks berita 4 (*Ada Korupsi Dana Bansos, Kapolri: Saya Sikat*) terlihat pada p-1, p-2, dan p-3. Ketiga paragraf dijadikan fungsi abstraksi dari pikiran atau konsep penulisan berita, yakni penonjolan frasa tertentu, seperti ‘menindak tegas,’ ‘menggigit,’ ‘sikat,’ dan ‘proses pidana.’ Pemilihan frasa (diksi) bertujuan mengategorisasi inti pesan sekaligus memperjelas fungsi narasi berita agar lebih menyentuh aspek emosi (psikis) dan mudah dipahami pembaca. Dari sisi penggunaan bahasa (pilihan kata; diksi), kategorisasi berita seperti ini setidaknya dapat dibaca dalam dua makna: (1) Kapolri Idham Azis (dan presiden Jokowi) terkategori sebagai pimpinan Polri yang memiliki sikap tegas terhadap praktik korupsi; (2)

Idham adalah sosok Kapolri yang patuh pada perintah presiden (sebagai inti pesan berita) untuk ‘menggigit’ oknum pejabat (sebagai wacana marjinal) yang berani melakukan korupsi dana Covid; (3) Idham adalah figur Kapolri tanpa kompromi (siapa pun yang melanggar hukum akan ‘disikat’); (4) Idham adalah sosok Kapolri yang taat hukum (akan memproses pelaku korupsi dana Covid dengan ‘hukuman sangat berat’).

Ideologi. Elemen ideologi pada narasi berita dapat ditelisik dari frasa: “*presiden sudah mempermudah pencairan dana covid.*” Penggunaan frasa ini bisa bermotif: (1) ‘pononjolan’ perintah presiden sebagai wacana utama (inti pesan politis berita); (2) frasa ‘kemudahan pencairan dana Covid’ untuk mengukuhkan ‘Jokowi’ sebagai sosok pemimpin pro-rakyat, yang gemar mempermudah urusan ‘urusan rakyat’; (3) ada penonjolan peran Kabareskrim Polri (Komjen Listyo Sigit Prabowo); (4) ada motif ‘konjungtif’ (coba menghubungkan/mengaitkan sikap pro-rakyat Jokowi dengan sikap tegas Idham Azis selaku Kapolri); (4) delegitimasi wacana dominan (marjinalisasi diskursus publik) terkait ‘kegagalan pemerintahan Jokowi’ dalam mengantisipasi dan menangani dampak pandemi Covid-19. Sebab, menurut analisis Lowly Institute (2020) dan Ben Bland (2020), krisis Covid-19 di Indonesia bisa berlangsung semakin parah, bahkan fatal, jika kebijakan Jokowi saat ini tetap diteruskan. Kondisi ini merupakan dampak turunan dari lemahnya pendekatan taktis dan politis Jokowi, gaya *leadership*-nya yang *ad hoc*, dan kurangnya pemikiran strategis dalam *inner circle* pemerintahannya.

Rubrikasi. Elemen rubrikasi isu ‘Kapolri akan sikat korupsi dana bansos’ ditempatkan *tempo.co* dalam rubrik Nasional. *Positioning* judul dan narasi berita pada rubrik Nasional ditujukan untuk memperkuat skema konstruksi berita: (1) mengategorisasi berita sebagai isu publik (*public issues*); (2) skema peristiwa didefinisikan sebagai isu ‘umum,’ bukan isu ‘hukum/*lex specialis*’; (3) rubrikasi bertendensi menggiring opini agar publik secara definisional memaknai peristiwa berita sebagai keseriusan Kapolri Idham Azis untuk ‘menyikat siapa pun’ yang berani mengorupsi dana Covid-19; (4) *Statement* Idham Azis menjadi sandaran seluruh narasi berita; (5) ada miskategorisasi dalam *frame* berita, yakni bentuk penggiringan opini terkait sikap tegas Kapolri dan (sebagai upaya tersembunyi untuk peningkatan citra) institusi Polri. Rubrikasi memiliki implikasi konseptual dalam membentuk peta kognisi dan persetujuan khalayak terhadap isi berita (isu korupsi dana Covid) dan informasi (para aktor yang direpresentasikan dalam pemberitaan) yang dibacanya.

Klasifikasi. Elemen *klasifikasi* berita terdapat pada p-4, p-5, dan p-6 yang memberi penonjolan pada frasa ‘(Polri) telah membentuk Satuan Tugas (di bawah Kabareskrim Polri),’ ‘akan menindak oknum yang terbukti menyalahgunakan dana Covid-19,’ ‘tidak menyalahgunakan kelonggaran aturan dana Covid dengan tujuan memperkaya diri,’ dan ‘ancaman pada siapa saja yang bermain curang dengan hukuman berat.’ Dalam konteks framing, klasifikasi berita menunjukkan ada keseriusan Kapolri dalam melaksanakan pengawasan penyaluran dan penggunaan dana Covid-19, melalui: (1) penekanan keseriusan/ketegasan Kapolri sebagai narasi utama; (2) aspek ikutan: ‘promosi’ kepada Kabareskrim Polri (Komjen Listyo Sigit Prabowo) selaku ‘orang dekat’ Kapolri; (3) peningkatan citra Kapolri sekaligus legitimasi citra institusi Polri di mata publik; (4) ada penonjolan pada kalimat ‘tak menyalahgunakan kelonggaran aturan dana Covid dengan tujuan memperkaya diri’ sebagai *warning* kepada para pejabat negara lain yang bergaya hidup mewah (sementara Idham Azis dan Listyono Sigit Prabowo dikenal sebagai dua sosok perwira tinggi Polri dengan gaya hidup sederhana).

Diskusi

Sebagai cara membongkar peristiwa, teknik *framing* yang digunakan keempat portal berita dalam menarasikan realitas potensi korupsi dana bansos terkonstruksi dengan variasi, aksentuasi,

dan derajat yang berbeda. Keempat portal berita melakukan seleksi (*selection*), penonjolan (*selience*), pemilihan sudut pandang (*angle*), dan makna (*meaning*) serta pertautan fakta ke dalam logika berita guna menggiring opini dan persetujuan publik (*public concensus*) terkait isu potensi korupsi dana bansos. *Framing* *vivanews.com*, *okezone.com*, *detik.com*, dan *tempo.co* juga dimaksudkan agar berita yang ditulis terlihat lebih menarik, bermakna, dan mudah dipahami/diingat oleh khalayak (Eriyanto, 2011).

Ditinjau dari perspektif konstruksi sosial, isu potensi korupsi dana bansos di era pandemi memiliki relevansi ditelisik dari sisi relasi wacana, yakni saat keempat portal berita mengonstruksi isu ini sebagai ‘realitas objektif’ menjadi ‘realitas subjektif.’ Relasi dialektis tersebut berlangsung saat keempat portal berita memfasilitasi pertarungan ide (peningkatan citra pejabat diri dan citra institusi negara) yang bersifat subjektif menjadi realitas objektif saat isu tersebut berelasi atau beresonansi dengan wacana potensi korupsi dana bansos yang terepresentasikan di ruang pemberitaan media.

Ditelisik dari sisi konsep relasi aktor-media-khalayak, Firli Bahuri dan Idham Azis adalah pejabat negara penegak hukum yang (dalam konteks kebijakan pandemi) juga bisa berperan sebagai aktor (politik) yang secara aktif bersaing merebut simbol-simbol (peningkatan citra diri dan citra insitusinya). Seperti dikatakan DiMagio dan Powell (1988), ketika aktor/agen akan melakukan tindakan terbaik untuk meningkatkan citra dirinya, sesungguhnya ia juga tengah membangun citra institusi yang dipimpinya. Artinya, peningkatan citra dan eksistensi institusi (KPK dan Polri) adalah alasan lain Firli Bahuri (Ketua KPK) dan Idham Azis (Kapolri) untuk merubah motivasi pribadi (peningkatan citra dirinya) ke motivasi institusi (peningkatan citra KPK dan Polri sebagai institusi).

Vivanews.com, *okezone.com*, *detik.com*, dan *tempo.co* adalah empat portal berita yang berperan penting dalam merelasi/meresonansi *frame* utama terkait isu potensi korupsi maupun opini para aktor (selaku narasumber berita), sehingga pemaknaan atas potensi korupsi bisa dikonstruksi keempat portal berita sebagai ‘pembingkai strategis’ (*strategic frame*) yang saling memengaruhi di antara isu korupsi, media, dan khalayak. *Framing* keempat portal berita tentu saja tidak berjalan *linear*, karena saat keempat portal berita mengonstruksi *frame* pemberitaan negatif terkait pernyataan para aktor (selaku narasumber berita), sesungguhnya para aktor (Ketua KPK/Kapolri) juga tengah memanfaatkan *frame* isu korupsi dana bansos untuk memengaruhi persepsi khalayak (membentuk opini publik).

Kondisi di atas relevan dengan pandangan Snow (2017), dimana institusi publik (KPK dan Polri) yang tengah menghadapi penurunan tingkat kepercayaan publik (*public distrust*) tentu membutuhkan teknik untuk memulihkan kembali citra dirinya. Salah satu pilihan strategis adalah melibatkan media, yakni menghadirkan kembali wacana dominan sebagai pembingkai utama yang bisa meresonansi, memberi peluang, dan mengukuhkan kembali konsensus sosial terkait peran penting KPK dan Polri sebagai pengawal dan pengawas korupsi dana bansos sebagai narasi utama berita. Sementara dilihat dari konsep *Neuroscience*, proses pemulihan kepercayaan publik atas institusi bisa dilakukan dengan memproduksi sebanyak mungkin *oxytocin* (bingkai strategis) untuk membentuk efek positif persepsi publik terhadap peningkatan citra KPK dan Polri. Semakin banyak *oxytocin* (bingkai strategis) yang dihasilkan sebagai inti berita, maka akan semakin cepat proses pemulihan persepsi publik atas citra diri Ketua KPK dan institusi KPK serta citra diri Kapolri dan institusi Polri (Zak, 2017).

Framing potensi korupsi dana bansos merupakan struktur konseptual atau perangkat kepercayaan yang telah diorganisir keempat portal berita untuk memengaruhi konstruksi wacana korupsi dengan menyediakan kategori-kategori melalui teknik seleksi dan penonjolan berita. Sebagai praktik bahasa dan kode linguistik, para aktor yang mengomunikasikan pesan-pesan moral

dan etis atas wacana korupsi tetap berpotensi menghadapi *framing* media, melalui teknik penandaan; yang secara sintaksis ditujukan untuk merelasikan pola, peristiwa atau isu-isu publik yang telah ditetapkan media sebagai wacana dominan. Sebagai seni mengomunikasikan pesan dan teknik menafsirkan emosi khalayak, *framing* jelas membutuhkan bingkai utama (*master frame*) yang harus disajikan pada khalayak; melalui seleksi isu dan penonjolan simbol/citra yang telah dipilih, diformulasi, dan disesuaikan untuk mencapai pbingkaian strategis (*strategic frame*) dan terciptanya gaung bingkai (*frame resonance*).

Melalui pewacanaan isu potensi korupsi dana bansos, penegakan hukum, efektivitas penyaluran dan penggunaan dana (bansos), delegitimasi atas praktik korupsi (dana bansos), dan meraih kembali kepercayaan publik (*regain of public trust*) yang digunakan sebagai kategorisasi (isu) dan klasifikasi (berita) untuk melegitimasi gagasan tertentu, maka isu potensi korupsi dana bansos bisa dibaca atau dieja sebagai *entry point* bagi kontestasi ‘gagasan politis’ dan ‘pertarungan ideologi’ atas praktik dan modus korupsi politik sebagai produk kekuasaan negara. Praktik, modus, dan perilaku koruptif yang menjadi motivasi dasar kecurigaan publik (*public suspicion*) terjadi akibat kekuasaan politik negara yang berwatak sentralistik-monopolistik plus hak diskresi para pejabat negara yang besar namun minus akuntabilitas. Artinya, korupsi adalah: monopoli negara plus (+) hak diskresi pejabat negara minus (-) akuntabilitas (*corruption = monopoly + discretion – accountability*) (Klitgaard, 1998).

PENUTUP

Hasil pembahasan dan analisis terkait konstruksi pemberitaan potensi korupsi dana bansos di era pandemi yang telah dianalisis melalui penggunaan teori framing Murray Edelman pada teks berita *vivanews.com*, *okezone.com*, *detik.com*, dan *tempo.co* dapat disimpulkan sebagai berikut.

Teks berita 1 (*vivanews.com*). Elemen *kategorisasi*: terdapat aspek kontroversi dalam penyajian fakta berita. Elemen *ideologi*: upaya penggeseran isu wacana korupsi dari pemerintah pusat pada Pemprov DKI; juga upaya delegitimasi/marjinalisasi pada sosok AB. Elemen *rubrikasi*: menempatkan isu potensi korupsi dana bansos sebagai opini (bersifat), bukan fakta berita. Elemen *klasifikasi*: upaya klarifikasi (*counter discourse*) dari Pemprov DKI dan AB terkait isu transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan/penyaluran dana bansos dan SOP bagi warga terdampak.

Teks berita 2 (*okezone.com*). Elemen *kategorisasi*: keberhasilan KPK dalam memetakan titik rawan potensi korupsi dana bansos. Elemen *ideologi*: upaya KPK meningkatkan citra diri dan citra institusinya; memosisikan KPK sebagai pahlawan; memarjinalisasi fakta kegagalan pemerintah. Elemen *rubrikasi*: menempatkan isu korupsi dana bansos sebagai isu politik dan sosial ketimbang isu hukum. Elemen *klasifikasi*: mengonstruksi wacana tandingan untuk merehabilitasi citra institusi.

Teks berita 3 (*detik.com*). Elemen *kategorisasi*: ada unsur keraguan Komisi III DPR RI terkait kemampuan KPK dalam mengawasi penggunaan dana corona sebesar 45 trilyun (penonjolan kalimat kerjasama dengan kejaksaan, efektivitas pengawasan, dan koordinasi lintas instansi). Elemen *ideologi*: ada penggiringan opini agar publik melihat secara positif keseriusan dan komitmen KPK dalam mengawasi penyaluran dan penggunaan dana corona. Elemen *rubrikasi*: menempatkan berita sebagai isu publik, bukan isu hukum atau isu kebijakan. Elemen *klasifikasi*: konstruksi berita disusun dengan menonjolkan frasa keraguan Komisi III DPR (unsur marjinalisasi KPK) sebagai narasi utama.

Teks berita 4 (*tempo.co*). Elemen *kategorisasi*: ada penonjolan sosok Kapolri sebagai pribadi yang tegas, tidak pandang bulu, patuh pada perintah atasan (presiden), dan taat pada hukum. Elemen *ideologi*: ada penonjolan peran presiden dan Kabareskrim Polri; delegitimasi wacana kegagalan pemerintah dalam mengantisipasi dan menangani dampak pandemi. Elemen *rubrikasi*:

menempatkan berita sebagai isu publik sebagai *positioning* untuk memperkuat skema konstruksi berita. Elemen *klasifikasi*: keseriusan Kapolri dalam mengawasi penyaluran dan penggunaan dana Covid; akan menindak oknum yang terbukti menyalahgunakan dana Covid (apalagi untuk memperkaya diri).

Dengan demikian, konstruksi berita potensi korupsi dana bansos di masa pandemi pada portal berita *vivanews.com* cenderung kritis-oposisional, *okezone.com* bernuansa netral-positif, *detik.com* berciri kritis-responsif, dan *tempo.co* bersifat kritis-advokatif.

Kajian ini merekomendasikan kepada para pembaca untuk berhati-hati dan bersikap bijak saat membaca dan memaknai isiberita media. Sementara bagi wartawan, pengelola, dan pemilik media, kajian ini juga merekomendasi agar para pihak tersebut dapat menyampaikan peristiwa apa adanya dan tidak memihak, sebagai wujud tanggung jawab moral media pada pencerdasan kehidupan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, M.R. (2020). "ICW-Transparency Paparkan 22 Catatan Buruk KPK Era Firli"(tempo.co, June 26, 2020) in <https://nasional.tempo.co/read/1357947/icw-transparency-paparkan-22-catatan-buruk-kpk-era-firli> (Accessed: July 24, 2020).
- Akhmad, H.T. (2020). "KPK Petakan Titik Rawan Korupsi saat Pandemi Covid-19"(okezone.com, April 29, 2020) in <https://nasional.okezone.com/read/2020/04/29/337/2206624/kpk-petakan-titik-rawan-korupsi-saat-pandemi-covid-19> (Accessed: June 25, 2020).
- Alkotsar, A. (2009). Korelasi korupsi politik dengan hukum dan pemerintahan di negara modern (Telaah tentang praktik korupsi politik dan penanggulangannya). *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 16(Edisi Khusus): 155-179.
- Amundsen, I. (1999). *Political corruption: An introduction to the issues*. Chr. Michelsen Institute.
- Ardianto, E., dkk.(2011). *Komunikasi massa: Suatu pengantar*. Bandung: Symbiosa Rekatama.
- Ariestya, A. (2016). Efek bingkai berita online terhadap penilaian heuristik individu. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 5(2): 100-111. <https://doi.org/10.7454/jki.v5i2.8297>.
- Arifin, P. (2013). Persaingan tujuh portal berita online Indonesia berdasarkan analisis Uses and Gratifications. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 10(2): 195-212. <https://doi.org/10.24002/jik.v10i2.353>.
- A'yun, R.Q. &A.M. Mudhoffir(2020). Indonesia is exploiting the COVID-19 crisis for illiberal purposes. (*Melbourne Asia Review*, May 15, 2020) in <https://melbourneasiareview.edu.au/indonesia-is-exploiting-the-covid-19-crisis-for-illiberal-purposes/> (Accessed: July 9, 2020).
- Aziz, M. (2017). "Modus-Modus Operandi Korupsi Lewat Dana Hibah"(tirto.id, January 31, 2017) in <https://tirto.id/modus-modus-operandi-korupsi-lewat-dana-hibah-chWR> (Accessed: July 12, 2020).
- BBC (2020). "Mensos Juliari Batubara jadi tersangka korupsi bansos Covid-19, ancaman hukuman mati bakal menanti?" (bbc.com, December 6, 2020) in <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55204360>(Accessed: December 6, 2020).
- Berger, P.L. &T. Luckmann (1990). *Tafsir sosial atas kenyataan: Risalah sosiologi pengetahuan*. Jakarta: LP3ES.
- Bernie, M. (2020). "Mengapa Kepercayaan Publik ke KPK Terjun Bebas di Era Firli Bahuri?"(tirto.id, February 26, 2020) in <https://tirto.id/mengapa-kepercayaan-publik-ke-kpk-terjun-bebas-di-era-firli-bahuri-eBev> (Accessed: July 11, 2020).
- Bland, B.(2020). "COVID-19 Reveals Cracks in Indonesia's Leadership"(channelnewsasia.com, March 18, 2020) in <https://www.channelnewsasia.com/news/commentary/covid-19->

- [coronavirus-jokowi-indonesia-government-response-health-12551876](#)(Accessed: July 22, 2020).
- Boothman, D. (2008). The sources for Gramsci's concept of hegemony. *Rethinking Marxism*, 20(2): 201-215. DOI: 10.1080/0893569080191694.
- Cahyani, I.P. (2019). Digital literacy of lecturers as whatsapp group users in spreading hoax informations and hate speech. *Expose: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(2): 147-163. <http://dx.doi.org/10.33021/exp.v2i2.562>.
- Dharmakarja, I.G.M.A. (2017). Rekonstruksi belanja bantuan sosial. *Substansi*, 1(2), 373-389. <http://dx.doi.org/10.35837/subs.v1i2.258>.
- Departemen Pendidikan Nasional (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- DiMaggio, P. &W. Powell(1988). Interest and agency in institutional theory (pp 267-292), in J. Meyer &R. Scott (ed.). *Organizational environments*. Beverly Hills: SagePublications.
- Edelman, M. (1993). Contestable categories and public opinion. *Journal Political Communication*, 3(10):231-242. DOI: 10.1080/10584609.1993.9962981.
- Entman, R. (1993). Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. *Journal of Communication*, 43(4): 51-58. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x>.
- Eriyanto (2011). *Analisis framing: Konstruksi, ideologi, dan politik media*. Yogyakarta: LKiS.
- FITRA(2016). Potensi Penyelewengan Dana Hibah & Bantuan Sosial Pada Provinsi Banten Tahun APBD 2014-2015 Sebesar Rp. 114,76 M (Kertas Kerja Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran)in https://seknasfitra.org/wp-content/uploads/2016/05/Potensi-Penyelewengan-Dana-Hibah-Bantuan-Sosial-Pada-Provinsi-Banten-2014_2015.pdf (Accessed: June, 20, 2020).
- Gitlin, T.(1980). *The whole world is watching: Mass media in the making and unmaking of the new left*. Berkeley: University of California Press.
- Haliim, W.&L.F. Dwiranda(2020). Problematika kebijakan dana hibah dan bantuan sosial sumber APBD: Relasi korupsi terhadap kekuasaan, kepemimpinan, dan perilaku elite. *Inovasi*, 17(1): 39-5. <https://doi.org/10.33626/inovasi.v17i1.136>.
- Hamad, I. (2007). Lebih dekat dengan analisis wacana. *Mediator*, 8(2): 325-344. <https://doi.org/10.29313/mediator.v8i2.1252>.
- Harahap, M.F.(2020). Potensi Maladministrasi dan Korupsi Bansos Covid-19(ombudsman.go.id, June 16, 2020) in<https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--potensi-maladministrasi-dan-korupsi-bansos-covid-19>(Accessed:June 20, 2020).
- Hasan, M., dkk.(2020). Korupsi dan Masalah Penanganan Covid-19(antikorupsi.org, April, 2020) in https://antikorupsi.org/sites/default/files/korupsi_dan_masalah_penanganan_covid-19_seknas_fitra.pdf(Accessed: June 20, 2020).
- Hasanuddin, I. (2018). Keadilan sosial: Telaah atas filsafat politik John Rawls. *Refleksi*, 17(2):193-204. <https://doi.org/10.15408/ref.v17i2.10205>.
- Hidayat, D. (2002). Metodologi penelitian dalam sebuah *multi-paradigm science*. *Mediator*, 3(2):197-219. <https://doi.org/10.29313/mediator.v3i2.766>.
- IASC-MHPSS. (2020). Catatan Tentang Aspek Kesehatan Jiwa dan Psikososial Wabah COVID-19 Versi 1.0(who.int.February 7, 2020) in https://www.who.int/docs/default-source/searo/indonesia/covid19/catatan-tentang-aspek-kesehatan-jiwa-dan-psikososial-wabah-covid-19-feb-2020-indonesian.pdf?sfvrsn=ebae5645_2 (Accessed: July 9, 2020).
- Ikbar, Y.(2012). *Metode penelitian kualitatif: Panduan membuat tugas akhir/karya ilmiah*. Bandung: PT. Refika Aditama.

- Ilahi, H.N. (2018). Women and hoax news processing on whatsapp. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 22(2): 98-111. <https://doi.org/10.22146/jsp.31865>.
- Indikator Politik Indonesia (2016). Revisi UU KPK dan Pertaruhan Modal Politik Jokowi (Temuan Survei Nasional: 18-26 Januari 2016)in https://indikator.co.id/uploads/20160208141409_Bahan_Rilis_Indi_KPK_JOKOWI.pdf (Accessed: July 11, 2020).
- Jamil, A. (2014). Gerakan sosial dalam perspektif framing: Studi pembentukan proses dan pertarungan framing pada gerakan sosial sengketa Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Polri tahun 2009 dan 2012 in <http://lib.ui.ac.id/file?file=pdf/abstrak-20364586.pdf> (Accessed: July 09, 2020).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi Ketiga) (2005). Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas dan Balai Pustaka.
- Khalisotussurur, L. (2020). “Anggaran Bantuan Sosial PSBB Jakarta Berpotensi Dikorupsi, Benarkah?” (vivanews.com, April 14, 2020) in <https://www.vivanews.com/viva-fakta/45129-anggaran-bantuan-sosial-psbb-jakarta-berpotensi-dikorupsi-benarkah?medium=autonext>(Accessed: June 18, 2020).
- Klitgaard, R.(1998). *Membasmi korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Lokadata (2021). “Indeks Persepsi Korupsi Indonesia, 2004-2020” (lokadata.id, January 29, 2021) in <https://lokadata.id/data/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2004-2020-1611921280> (Accessed: June 17, 2020).
- Lowly Institute(2020). “Indonesia: Covid-19 Crisis Reveals Cracks in Jokowi’s ad hoc Politics” (lowyinstitute.org, March 17, 2020) in <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/indonesia-covid-19-crisis-reveals-cracks-jokowi-s-ad-hoc-politics> (Accessed: July 22, 2020).
- Lubis, M. &J.C. Scott(2005). *Bunga rampai korupsi*. Jakarta: LP3ES dan Yayasan Obor.
- McQuail, D. (2011). *Teori komunikasi massa* (Edisi6, Buku 1).Jakarta: Salemba Humanika.
- Mubarak, I. (208). “Jenis-Jenis Website Berdasarkan Fungsi, Platform, dan Sifatnya” (niagahoster.co.id, August 22, 2018) in <https://www.niagahoster.co.id/blog/jenis-website/>(Accessed: June 21, 2020).
- Muttaqin, L.&M.E. Susanto(2018). Mengkaji serangan balik koruptor terhadap KPK dan strategi menghadapinya. *Integritas*, 4(1): 101-143. <https://doi.org/10.32697/integritas.v4i1.146>.
- Negara, S.B &U. Rusadi(2020). Dinamika relasi dan kuasa negara dalam produksi konten di media siber pemerintah menjelang pemilihan umum presiden 2019. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, 24(1),57-72. <http://dx.doi.org/10.31445/jskm.2020.2425>.
- Pramelani(2018). Terpaan informasi *hoax* McDonald di *whatsapp* terhadap kepercayaan konsumen. *Jurnal Komunikasi*, 9(2): 197-202. <https://doi.org/10.31294/jkom.v9i2.4392>.
- Rahardjo, M. (2018). Paradigma Interpretifin <http://repository.uinmalang.ac.id/2437/1/2437.pdf>(Accessed: June 23, 2020).
- Rahma, A. (2020).“Ada yang Korupsi Dana Bansos, Kapolri: Saya Sikat”(tempo.co, June 16, 2020) in <https://nasional.tempo.co/read/1353998/ada-yang-korupsi-dana-bansos-kapolri-saya-sikat> (Accessed: June 18, 2020).
- Ramadhana, K. &A. Nicola(2020). *Pemantauan Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi Desember 2019-Juni 2020*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch dan Transparency International Indonesia.
- Rawls, J.(1999). *A theory of justice* (Revised Edition). The Belknap Press of Harvard University Press Cambridge, Massachusetts.

- Romli, A.S.M. (2012). *Jurnalistik online: Panduan praktis mengelola media online*. Bandung: Nuansa Cendikia.
- Riawati, N. (2015). Potensi korupsi dalam kebijakan publik: Studi kasus korupsi Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 19(2): 154-168. <https://doi.org/10.22146/jsp.10851>.
- Sari, A.D.K. (2020). “KPK Terima 118 Laporan Keluhan Penyaluran Dana Bansos, Apa Saja?”(kabar24.bisnis.com, June 8, 2020) in <https://kabar24.bisnis.com/read/20200608/15/1249896/kpk-terima-118-laporan-keluhan-penyaluran-dana-bansos-apa-saja>(Accessed June 19, 2020).
- Snow, S.(2017). Why major institutions lost public trust, and how they can gain it back (contently.com, December 15, 2017)in <https://contently.com/2017/12/15/institutions-regain-public-trust/>(Accessed: June 28, 2020).
- Widjojanto, B. (2017). Relasi korupsi korporasi dan korupsi politik: Kajian awal melacak korupsi politik di korporasi. *Integritas*, 1(3): 31-52. <https://doi.org/10.32697/integritas.v3i1.139>.
- Yuntho, E. (2020). “Pencegahan Korupsi Dana Wabah Corona”(tempo.co, March 26, 2020) in <https://kolom.tempo.co/read/1324021/pencegahan-korupsi-dana-wabah-corona> (Accessed: June 19, 2020).
- Zak, P.J. (2017). The neuroscience of trust: Management behaviors that foster employee engagement (*Harvard Business Review*, January-February Edition, 2017)in <https://hbr.org/2017/01/the-neuroscience-of-trust>(Accessed: June 27, 2020).
- Zhakcy, M. (2020). “Ketua Komisi III Minta KPK Awasi Dana Corona: Kerja Sama dengan Kejaksaan”(detik.com, April 29, 2020) in <https://news.detik.com/berita/d-4996190/ketua-komisi-iii-minta-kpk-aktif-awasi-dana-corona-kerja-sama-dengan-kejaksaan>(Accessed: June 18, 2020).